

**PENGARUH PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH  
DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN  
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN  
(Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang)**

Arru<sup>1\*</sup>, Otniel Safkaur<sup>2</sup>, John U. Blesia<sup>3</sup>

<sup>1\*23</sup> *Program Studi Magister Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Cenderawasih*

*\*Corresponding Author*

**Abstract**

*High-quality financial reports are essential, as they provide reliable information that supports effective decision-making processes. This study aims to analyze the impact of regional asset administration and the internal control system on the quality of financial reports within the regional government of Pegunungan Bintang Regency. The research adopts a descriptive quantitative approach using an explanatory method to identify and evaluate the relationship between the studied variables. A total of 78 respondents participated in the study, comprising individuals directly involved in financial management and reporting within the local government. Data were collected through questionnaires and analyzed using appropriate statistical techniques. The findings reveal that both regional asset administration and the internal control system significantly influence the quality of financial reports. These results highlight the importance of proper asset management and strong internal controls to ensure accurate, transparent, and accountable financial reporting in regional public sector organizations. Improvements in these areas can enhance public trust and decision-making effectiveness.*

**Keywords:** *Administration of Regional Property, Internal Control System and Quality of Financial Reports*

**Abstrak**

Laporan keuangan yang berkualitas baik menunjukkan bahwa informasi yang terkandung di dalamnya dapat digunakan dalam mengambil keputusan. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh penatausahaan Barang Milik Daerah dan Sistem pengendalian Intern terhadap kualitas laporan keuangan pada pemda Kabupaten Pegunungan Bintang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode eksplanatori (explanatory research). Responden 78 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penatusahaan Barang Milik daerah dan sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

**Kata Kunci:** Penatusahaan Barang Milik Daerah, Sistem Pengendalian Intern dan Kualitas Laporan Keuangan

## Pendahuluan

Laporan Keuangan merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan cerminan dari hasil aktifitas tertentu. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode. Pemerintah daerah harus mampu menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Terdapat empat karakteristik laporan keuangan menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Karakteristik laporan keuangan yang berkualitas antara lain Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Di era reformasi saat ini menyebabkan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, adil, transparan dan akuntabel. Salah satu bentuk pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang menjadi tuntutan masyarakat adalah terwujudnya suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Wujud pertanggung jawaban pemerintah, upaya yang dilakukan adalah dengan menyampaikan Laporan Pertanggung jawaban Keuangan. Sesuai dengan Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara, bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu baik berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut.

Ditetapkannya kewajiban penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah pengakuan/pencatatan, pengukuran atau penilaian dan penyajian serta pengungkapan Barang Milik Daerah (BMD) sering kali menjadi fokus utama karena memiliki nilai yang sangat signifikan dan memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi terutama aset tetap (PP nomor 71 tahun 2010) Barang Milik Daerah pada Laporan Keuangan tercatat di neraca, pada pos persediaan, aset tetap dan juga aset tetap lainnya. BMD diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, yang diturunkan ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah dalam upaya mewujudkan tertib administrasi pengelolaan aset tetap.

Aset merupakan salah satu pos di dalam neraca laporan keuangan yang memiliki nilai cukup besar. Penatausahaan aset sendiri memiliki tujuan untuk menghasilkan data dan informasi yang akurat mengenai aset-aset milik pemerintah daerah yang akan digunakan sebagai bahan acuan dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, Wiguno (2022)

Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyampaikan LKPD (PP Nomor 71 tahun 2010). Penerapan standar akuntansi pemerintah oleh pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian Intern merupakan aspek penting dalam sistem akuntansi untuk meyakinkan keakuratan laporan keuangan yang berkualitas. Pengendalian internal terdiri dari beberapa unsur diantaranya, lingkungan pengendalian, pengendalian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, monitoring (PP nomor 60 tahun 2008)

Temuan BPK tersebut merupakan *warning* bagi pemerintah daerah terkait pengelolaan BMD yang belum sesuai Sistem Pengendalian Interen (SPI) yang belum optimal dilaksanakan. Sebagai contoh Laporan Keuangan Kabupaten Pegunungan Bintang tahun 2020 menyajikan 1). Nilai penambahan aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 39.503,83 juta. Nilai ini tidak didukung dengan rincian. BPK tidak memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup dan tepat tentang nilai tersebut karena tidak tersedia data dan informasi pada satuan kerja terkait. 2). Aset tetap peralatan dan mesin tidak dilengkapi BAST, dan surat pernyataan tanggungjawab atas penggunaan, serta kendaraan sebanyak satu register pada Dinas Perhubungan dikuasai pihak lain. Selain mendapat sorotan dari BPK, permasalahan aset tersebut tentunya akan menimbulkan berbagai perspektif dalam masyarakat mengenai kinerja pemerintah daerah yang dinilai belum maksimal, dan dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Peneliti juga akan mencoba menyusun solusi yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mengatasi kendala pada penatausahaan barang milik daerah serta kaitannya dengan sistem pengendalian internal. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan *explanatory research*

Berdasarkan masalah yang telah diuraikan maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1) Mendeskripsikan tentang pengaruh Pentausahaan BMD terhadap kualitas laporan Keuangan di Kabupaten Pegunungan Bintang; 2) untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal, berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan di Kabupaten Pegunungan Bintang.

## Kajian Pustaka

### Teori Penetapan Tujuan

Teori penetapan tujuan dikemukakan oleh Locke (1968) merupakan salah satu bentuk teori motivasi yang menekankan pada pentingnya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dan kinerja yang dihasilkan. Konsep dasar dari teori ini menurut Robbins (2008) adalah seseorang mampu memahami tujuan yang diharapkan oleh organisasi, maka pemahaman tersebut akan mempengaruhi perilaku kerjanya. *Goal setting theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan. Jika seorang individu memiliki komitmen untuk mencapai tujuannya, maka komitmen tersebut akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kerjanya.

Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah baik yang diperoleh atas beban APBD maupun berasal dari perolehan lain yang sah. Baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, dan ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tidak termasuk uang dan surat berharga lainnya

Menurut Tunggal (2003) menyatakan bahwa pengendalian intern merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh *board of director*, manajemen dan personil yang lain, yang didesain

untuk mendapatkan keyakinan memadai (*Reliability assurance*) tentang pencapaian dalam hal-hal seperti kesudahan laporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku, dan efektifitas dan efisiensi operasi

Sedangkan menurut Mulyadi (2001) mendefinisikan sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode-metode dan ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **Penatausahaan Barang Milik Daerah**

Dalam Peraturan Pemerintah No, 27 tahun 2014, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang milik daerah yang meliputi : perencanaan kebutuhan, penganggaran dan pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengemaman dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan. Serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Penatusahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Rahman (2012) dalam modul akuntansi Pemerintahan mendefinisikan penatusahaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengelolaan keuangan daerah, baik menurut Peraturan Pemerintah nomor 58 Tahun 2005 maupun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006, Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Juknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Tujuan utama dari Penatausahaan barang milik daerah adalah memberikan kebenaran data yang diperoleh dan mengetahui kepastian nilai, hukum, jumlah, serta kondisi barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Peran pengguna barang milik daerah seharusnya mampu melakukan pencatatan, pendataan serta mampu membuat laporan barang milik daerah di lingkup SKPD melalui pengurus barang yang ada.

Penatausahaan untuk setiap barang milik daerah yang telah ditetapkan status penggunaannya, dilakukan oleh setiap kepala SKPD. Setiap kepala SKPD melalui penyimpan/pengurus barang wajib melakukan penatusahaan BMD yang ada pada pengguna masing-masing. Yang dimaksud dengan penatusahaan dalam Permendagri nomor 17 tahun 2007 adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penatausahaan barang milik daerah, dilakukan 3 (tiga ) kegiatan yang meliputi kegiatan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

### **Sistem Pengendalian Intern**

Adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya

efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163).

Laporan Keuangan yang berkualitas memiliki karakteristik yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (PP Nomor 71 Tahun 2010). Standar Akuntansi Pemerintah merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berkualitas.

Pengendalian Internal merupakan aspek penting dalam sistem akuntansi untuk meyakinkan keakuratan laporan keuangan yang disajikan berkualitas. Pengendalian internal ini terdiri dari komponen sebagai berikut : a) lingkungan pengendalian, b) penilaian risiko, c) aktifitas pengendalian, d) informasi dan komunikasi, e) Monitoring (PP Nomor 60 Tahun 2008) Sistem Pengendalian Internal (SPI) merupakan sistem yang dirancang oleh manajemen atau pimpinan instansi untuk diterapkan secara menyeluruh di lingkungan organisasi. Pengendalian mempunyai fungsi dalam organisasi untuk memastikan organisasi masih berjalan di arah yang tepat sesuai tujuan organisasi (Ompusunggu dkk, 2018)

Ditinjau dari teori agensi, penerapan sistem pengendalian internal dalam proses penyusunan laporan keuangan dapat meningkatkan pengawasan atau kontrol yang bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan kecurangan yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja. Penerapan sistem pengendalian internal yang tidak maksimal dapat menyebabkan terjadinya tindak penyimpangan dan kemungkinan tidak terdeteksinya kecurangan maupun kesalahan yang terjadi dalam organisasi. Kelemahan sistem pengendalian dapat berdampak pada informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menjadi kurang berkualitas karena tidak memenuhi salah satu karakteristik kualitatif laporan keuangan yaitu keandalan.

### **Pengembangan Hipotesis**

Bagian ini menguraikan pengembangan tiga hipotesis, sebagai berikut:

#### *Pengaruh Penatausahaan Barang Milik Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan*

Dalam upaya pengendalian atas aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, penatausahaan aset ini bertujuan agar aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat diketahui keberadaannya, kondisinya dan besaran nilainya, sehingga aset yang dilaporkan dalam laporan keuangan sesuai sebagaimana mestinya, sekaligus membuktikan bahwa baik buruknya suatu penatausahaan aset dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H1 : Penatausahaan Barang Milik Daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang

#### *Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan*

Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

H2 : Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Pegunungan Bintang

## Metodologi Penelitian

Lokasi penelitian pada pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan. Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini teknik sampling yang digunakan yaitu *Purposive Sampling Methode* dengan alat analisis *Statistical Product and Service Solutions* (SPSS) versi 22, dengan metode analisis regresi linier berganda.

**Tabel 1**  
**Kriteria Sampel**

Kriteria	Frekuensi	Persentase
Bendahara Barang	38	48%
Pejabat penatusahaan BMD	4	5%
Kuasa pengguna BMD	6	8%
Bendahara Pengeluaran	13	17%
Pejabat penatusahaan keuangan	13	17%
APIP	4	5%
Jumlah	78	

Sumber: *Data diolah, 2023*

## Hasil Dan Pembahasan

### Pengujian Hipotesis

#### *Uji T*

**Tabel 2**  
**Hasil Uji T**

#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	9,234	3,501		3,393	,002

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
Penatausahaan Barang Milik Daerah	591	,444	300	1,520	,018
Sistem Pengendalian Internal	,517	427	312	4,211	,000

a. Dependent Variable: Y

Sumber: *Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 2, untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat adalah Penatausahaan BMD (X1) terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y). Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} (1,520) < t_{tabel} (2,052)$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu 0,018, sehingga  $H_1$  berbunyi bahwa Penatausahaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Sistem Pengendalian Internal (X2) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) Dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} (4,211) > t_{tabel} (2,052)$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu 0,000, sehingga  $H_2$  berbunyi bahwa sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan diterima

### Uji F

**Tabel 3**  
**Hasil Uji F**

ANOVA<sup>a</sup>

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	47,574	2	23,787	1,447	000 <sup>b</sup>
Residual	443,793	27	16,437		
Total	491,367	29			

a. Dependent Variable: Y

b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: *Data diolah, 2023*

Berdasarkan tabel 4.2, dapat disimpulkan bahwa dalam pengujian regresi linier berganda menunjukkan hasil F hitung sebesar 1,447 dengan tingkat signifikan 0,000 yang lebih kecil dari 0,5 dimana F hitung 1,447 lebih besar dari nilai F tabelnya sebesar 3,34 maka ini berarti reliabel

### Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ )

Pengujian hipotesis  $H_1$ ,  $H_2$ , dilakukan dengan analisis regresi berganda berpengaruh sistem pengendalian internal, dan Penatausahaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan perusahaan. Hasil pengujian tersebut ditampilkan sebagai berikut.

Koefisien determinasi ( $R_2$ ) mengukur kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dengan kata lain untuk mengukur seberapa besar persentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

**Tabel 4.**  
**Uji Koefisien Determinasi ( $R_2$ )**

#### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,426 <sup>a</sup>	,182	,121	3,85904

a. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber: *Data diolah, 2023*

Berdasarkan hasil uji koefisien deteminasi diatas, nilai  $R_2$  ( $R$  Square) dari model regresi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas (*independent*) dalam menerangkan variabel terikat (*dependent*). Dari table diatas diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,182 hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 18,2%

### Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam variabel penatusahaan barang milik daerah yang diuji masing-masing pernyataan dianggap valid. Hal itu terbukti dari nilai korelasi (rhitung) lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,361$ . Sedangkan menurut uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha dari variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuisisioner penatusahaan barang milik daerah dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Berdasarkan hasil variabel Penatausahaan BMD (X1) berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemda Pegunungan Bintang. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil bahwa  $t_{hitung} (1,520) < t_{tabel} (2,052)$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu 0,018, sehingga  $H_1$ . Berbunyi bahwa Penatausahaan BMD terhadap kualitas laporan keuangan diterima.

Selain itu, berdasarkan uji validitas menunjukkan bahwa semua item dalam variabel Sistem Pengendalian Internal yang diuji masing-masing pernyataan dianggap valid. Hal itu terbukti dari nilai korelasi (rhitung) lebih besar dari  $r_{tabel} = 0,361$ . Sedangkan menurut uji

reliabilitas menunjukkan bahwa nilai cronbach's alpha dari variabel lebih besar dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen dari kuisisioner Sistem Pengendalian Internal dinyatakan handal atau dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel. Hasil analisis yang telah diuraikan di atas diperoleh hasil bahwa variabel Sistem Pengendalian Internal (X2) ada pengaruh yang signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Y) pada Pemda Pegunungan Bintang. Hal tersebut ditunjukkan dari hasil bahwa  $t_{hitung} (4,211) > t_{tabel} (2,052)$  dan nilai signifikan  $< 0,05$  yaitu 000, sehingga  $H_2$  berbunyi bahwa sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan diterima. Hal ini berarti bahwa Sistem Pengendalian Internal perlu ditingkatkan dan dioptimalkan.

## Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian internal dan penatausahaan barang milik daerah terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Temuan juga menunjukkan adanya permasalahan dalam pengelolaan aset, sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2020, yang disebabkan oleh lemahnya pengawasan dan kurangnya ketegasan pimpinan. Hal ini mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal belum berjalan secara optimal. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pemerintah daerah serta peneliti lain di bidang yang sama.

Namun, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, seperti ruang lingkup objek yang sempit, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi secara luas. Selain itu, pengisian kuesioner oleh responden tidak didampingi langsung oleh peneliti, sehingga kemungkinan terdapat pemahaman yang kurang tepat terhadap pernyataan dalam kuesioner. Proses pengumpulan data juga memakan waktu lama karena keterbatasan waktu dari responden.

## Daftar Pustaka

- Badan Pemeriksa Keuangan. (2021). *Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Pegunungan Bintang tahun anggaran 2020* (No. 1.A/LHP/XIX.JYP/05/2021). <https://www.bpk.go.id/>
- Damanik, E. B. (2022). *Pengaruh penatausahaan aset dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan (Studi kasus pada Kabupaten Barito Utara)* [Skripsi, Universitas Terbuka].

- Hanafi, M. I. (2022). *Pengaruh penatausahaan aset tetap terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara* [Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara].
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang pedoman teknis pengelolaan barang milik daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Mokogonta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). Pengaruh sistem pengendalian interen dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 12(2), 874–890.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/>
- Suhayati, E., & Herdiah, M. B. (2021). Pengelolaan aset tetap (PSAP 07 aset tetap) dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 4(1), 45–56.
- Triono, S., & Dewi, S. N. (2020). Pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1–15.
- Wiguno, N. E. P. (2019). *Pengaruh sistem pengendalian internal, pengawasan inspektorat, penatausahaan aset tetap dan komitmen manajemen terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah* [Skripsi, Universitas Islam Indonesia].